

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PERUMUSAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 2025-2029 KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA SELATAN

Yosua Marinus Kambu

NPP. 32.1092

*Asdaf Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah
Email: 32.1092@praja.ipdn.ac.id*

Pembimbing Skripsi: Dr. Ir. H. Dwi Agus Sumarno, MM, M.Si

ABSTRACT

(Problem Statement/Background (GAP): *he research is based on the problem of suboptimal implementation of collaborative governance in the formulation of the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) in Asmat Regency, where the involvement of stakeholders such as the private sector and the community has not been maximized. Purpose: To analyze the implementation of collaborative governance in the formulation of the 2025–2029 RPJMD in Asmat Regency. Method: This study uses a qualitative descriptive method with purposive sampling and triangulation technique. Result: he findings indicate that although there is a commitment to collaboration, stakeholder involvement, and joint capacity development, the implementation of collaborative governance still faces obstacles such as limited access, lack of understanding, and inadequate institutional coordination. Conclusion: Collaborative governance in Asmat Regency requires improvement through inclusive planning, capacity strengthening, and better integration among institutions.*

Keywords: *Collaborative Governance, RPJMD, Stakeholder, Local Government*

ABSTRAK

Permasalahan (GAP) Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya penerapan collaborative governance dalam perumusan RPJMD Kabupaten Asmat, terutama pada aspek pelibatan aktor non-pemerintah dan mekanisme kolaboratif yang belum maksimal. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis implementasi collaborative governance dalam penyusunan RPJMD 2025–2029 di Kabupaten Asmat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik purposive sampling dan triangulasi data. **Hasil/Temuan:** asil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat komitmen dan partisipasi dari pemerintah daerah, kolaborasi dengan sektor non-pemerintah dan masyarakat masih terbatas. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain kurangnya pemahaman, partisipasi simbolis, dan belum sinerginya lembaga-lembaga terkait. **Kesimpulan:** Penerapan collaborative governance masih memerlukan penguatan dari segi kapasitas, komunikasi antar-aktor, serta pengintegrasian dalam kebijakan.

Kata kunci: Collaborative Governance, RPJMD, Pemerintah Daerah, Kolaborasi.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah (Borges et al., 2025) merupakan fondasi utama dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka menengah di tingkat lokal (Gupta & Sigdel, 2024). Salah satu instrumen penting dalam perencanaan tersebut adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program pembangunan selama lima tahun. Dalam konteks otonomi daerah, RPJMD tidak hanya menjadi produk administratif, tetapi juga mencerminkan dinamika politik, sosial, dan ekonomi yang terjadi di suatu daerah. Seiring dengan kompleksitas permasalahan pembangunan dan meningkatnya tuntutan partisipasi masyarakat, pendekatan perumusan RPJMD pun harus bertransformasi dari model top-down menjadi model yang lebih kolaboratif dan partisipatif. Di sinilah peran *collaborative governance* menjadi penting (Nururrohmah & Suhirman, 2016), sebagai suatu pendekatan tata kelola yang melibatkan berbagai aktor lintas sektor pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan public (Sumaryana et al., 2025).

Kabupaten Asmat, sebagai salah satu daerah tertinggal di Provinsi Papua Selatan, menghadapi tantangan yang cukup berat dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah yang inklusif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Karakteristik geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan infrastruktur, serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia menjadi hambatan utama dalam merumuskan perencanaan pembangunan yang ideal. Di sisi lain, tantangan pembangunan di Asmat juga menyangkut persoalan kesehatan masyarakat, pendidikan, kemiskinan ekstrem, dan ketimpangan antarwilayah. Kondisi ini menuntut pendekatan perencanaan yang tidak hanya bersifat teknokratik dan administratif, tetapi juga memperhatikan kolaborasi lintas aktor untuk menggali solusi yang lebih kontekstual dan aplikatif. Oleh sebab itu, penerapan prinsip-prinsip *collaborative governance* dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Asmat menjadi sangat relevan untuk dikaji lebih dalam.

Collaborative governance dalam konteks perencanaan pembangunan daerah dipahami sebagai proses pengambilan keputusan kolektif yang mengikutsertakan berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda, melalui komunikasi terbuka, saling percaya, dan tujuan Bersama (Sumarno, 2025). Model ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif dari masyarakat sipil, sektor swasta, tokoh adat, dan pemuda dalam merumuskan kebijakan publik, agar hasil perencanaan lebih representatif, aplikatif, dan mendapat legitimasi yang lebih kuat. Dalam praktiknya, penerapan *collaborative governance* memerlukan komitmen politik dari kepala daerah, kapasitas kelembagaan yang memadai, serta mekanisme partisipasi yang terstruktur. Di Kabupaten Asmat, upaya ke arah ini telah dimulai melalui forum-forum Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) (Firmansyah et al., 2023) dan penyusunan dokumen perencanaan partisipatif. Namun, masih terdapat berbagai persoalan terkait minimnya partisipasi masyarakat lokal, rendahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta belum optimalnya sinergi antar-OPD dalam mengelola proses kolaboratif tersebut (Putra et al., 2018).

Permasalahan lain yang mengemuka dalam proses penyusunan RPJMD di Kabupaten Asmat adalah dominasi pendekatan birokratik dan simbolis dalam menyerap aspirasi masyarakat. Dalam beberapa kasus, partisipasi yang diharapkan dari masyarakat dan sektor swasta hanya bersifat formalitas semata, tanpa benar-benar memengaruhi substansi dokumen perencanaan. Hal ini diperparah oleh keterbatasan informasi dan akses masyarakat terhadap proses perencanaan, terutama di distrik-distrik terpencil. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui hak dan kewenangannya dalam menyampaikan aspirasi pembangunan, sehingga ruang partisipatif yang telah disediakan tidak dimanfaatkan secara optimal. Padahal, dengan

kondisi sosial budaya yang sangat unik seperti di Asmat di mana nilai-nilai adat dan komunitarian sangat kuat proses perencanaan justru akan menjadi lebih efektif apabila mampu merangkul struktur sosial lokal sebagai mitra strategis pembangunan. Oleh karena itu, penting untuk menelaah sejauh mana pendekatan collaborative governance telah diterapkan dalam penyusunan RPJMD di Kabupaten Asmat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Gap Penelitian)

Kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas tersebut dengan implementasi yang terjadi di Kabupaten Asmat yang menunjukkan bahwa partisipasi aktor non-pemerintah seperti tokoh adat, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam proses perumusan RPJMD masih sangat terbatas dan cenderung simbolis. Forum-forum partisipatif seperti Musrenbang yang seharusnya menjadi ruang kolaboratif justru didominasi oleh elit birokrasi dan berlangsung secara formalitas belaka, tanpa adanya tindak lanjut yang nyata dari usulan masyarakat akar rumput. Akibatnya, dokumen RPJMD yang dihasilkan lebih banyak bersifat top-down dan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan serta karakteristik lokal masyarakat Asmat yang unik, terutama di wilayah-wilayah terpencil. Kesenjangan lainnya terletak pada kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) yang belum mendukung implementasi tata kelola kolaboratif secara optimal. Masih banyak perangkat daerah yang belum memahami pendekatan collaborative governance, baik dari sisi konsep maupun teknis penerapan. Belum adanya pedoman teknis pelibatan multipihak dalam penyusunan RPJMD menyebabkan kolaborasi hanya dilakukan secara informal dan tidak terstruktur. Di sisi lain, masyarakat juga belum memiliki kesadaran dan akses informasi yang cukup untuk berperan aktif dalam proses perencanaan, terutama akibat keterbatasan infrastruktur komunikasi dan pendidikan di daerah-daerah pedalaman Asmat.

1.3 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa studi sebelumnya yang relevan dengan permasalahan transportasi umum dan aksesibilitas angkutan kota. Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu Pertama, penelitian oleh Habibah et al. (2020) Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui kolaborasi antara pemerintah kota, pengurus RT/RW, dan masyarakat. Keberhasilan terlihat dari kesadaran akan pentingnya perencanaan kolaboratif, tetapi penelitian ini juga mencatat rendahnya partisipasi aktif dan kesadaran masyarakat, yang menjadi kendala utama dalam pelaksanaan Musrenbang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi dalam Musrenbang belum berjalan optimal, dan diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan agar lebih efektif dan partisipatif. Selanjutnya Bila & Saputra (2019) Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kolaborasi dalam pemerintahan tidak hanya dilihat dari hasil akhir, tetapi juga dari proses yang dijalani, dengan model yang diusulkan diharapkan dapat menjadi solusi dalam mencari tata kelola kolaboratif yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan publik, termasuk kekerasan terhadap perempuan. Pelaksanaan dari *Collaborative governance* melibatkan identifikasi masalah, keterlibatan semua aktor, dan komitmen untuk mencapai kesepakatan, serta mencakup diskusi dan kegiatan *face-to-face* untuk memastikan pemahaman yang sama di antara semua pihak, serta penyediaan edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan pencegahan terhadap kekerasan. Arrozaq (2016) Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kolaborasi telah berjalan dengan baik, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas pengembangan kawasan Minapolitan. Pelaksanaan kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk memperbaiki proses kolaboratif dan meningkatkan partisipasi semua pihak yang terlibat. Selanjutnya Aeni & Astuti (2019) Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor ini cukup berhasil, tetapi peningkatan

sosialisasi dan partisipasi masyarakat diperlukan untuk meningkatkan dampak dan keterlibatan masyarakat dalam acara tersebut. Selanjutnya dari penelitian Kusumawati et al (2023) Keberhasilan utama dalam penelitian ini adalah tercapainya komunikasi, kepercayaan, dan komitmen yang kuat antara pemangku kepentingan, yang secara signifikan mendukung keberhasilan pengelolaan wisata.

1.4. Pernyataan Keterbaruan Ilmiah

Meskipun konsep *Collaborative governance* telah banyak dikaji dalam konteks pembangunan daerah, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada wilayah dengan infrastruktur yang lebih maju dan dinamika pemerintahan yang relatif stabil, seperti daerah di Jawa dan Sumatera. Sementara itu, konteks lokal Papua Selatan khususnya Kabupaten Asmat memiliki kompleksitas tersendiri yang meliputi tantangan geografis, kekentalan adat istiadat, rendahnya literasi pembangunan, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan. Belum banyak penelitian yang secara mendalam menganalisis bagaimana mekanisme kolaboratif dijalankan dalam penyusunan dokumen strategis seperti RPJMD di wilayah dengan karakteristik unik ini. Kesenjangan literatur inilah yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini, sebagai upaya untuk memahami dinamika kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan sektor swasta dalam perumusan RPJMD 2025–2029 di Kabupaten Asmat. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis maupun praktis dalam memperkuat pendekatan tata kelola kolaboratif yang sesuai dengan konteks lokal.

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh faktor-faktor *Collaborative governance* Dalam Perumusan RPJMD 2025-2029 Kabupaten Asmat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi *collaborative governance* dalam proses penyusunan RPJMD Kabupaten Asmat 2025–2029. Pendekatan kualitatif memberikan fleksibilitas dalam pengumpulan dan analisis data, yang penting karena dinamika dan tantangan dalam proses kolaborasi antar pemangku kepentingan cenderung berkembang seiring waktu. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali persepsi, pengalaman, motivasi, dan pandangan para aktor yang terlibat secara langsung dalam penyusunan RPJMD (Ika Sartika, 2024). Pendekatan ini dipilih karena dinilai mampu menggambarkan secara komprehensif dinamika sosial, interaksi antar-aktor, serta proses kolaboratif yang terjadi dalam perencanaan pembangunan daerah (Kusworo et al., 2021). Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, observasi langsung di lapangan, serta dokumentasi kegiatan Musrenbang dan penyusunan RPJMD. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti dokumen RPJMD sebelumnya, dokumen Musrenbang, peraturan perundang-undangan, laporan Bappeda, serta literatur ilmiah terkait *collaborative governance* dan perencanaan pembangunan. Menurut Creswell (2016), “*research as key instruments. Qualitative researcher collect their own data through documentation, observation, or interview with the participant,*” yang berarti bahwa peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data melalui teknik observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Collaborative governance dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Asmat diterapkan sebagai bentuk respon terhadap tantangan partisipasi dan keberagaman kepentingan lokal. Proses kolaboratif melibatkan aktor dari unsur pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah (OPD), tokoh masyarakat adat, LSM, akademisi, dan sektor swasta. Namun, berdasarkan hasil wawancara dan observasi, implementasi ini belum berjalan optimal. Pendekatan *Collaborative governance* dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asmat periode 2025–2029 dianalisis berdasarkan empat komponen utama menurut Ansell dan Gash (2008) , yaitu *Starting Condition*, *Institutional Design*, *Facilitative Leadership*, dan *Collaborative Process*. Keempat komponen ini membentuk satu siklus kolaborasi yang saling berkaitan, dan sangat menentukan keberhasilan pengambilan keputusan bersama dalam konteks perencanaan pembangunan daerah.

3.1. *Starting Condition* (Kondisi Awal)

Kondisi awal (*starting condition*) dalam perumusan RPJMD Kabupaten Asmat mencerminkan posisi awal para aktor yang terlibat dalam kolaborasi. Dalam konteks ini, tiga aspek penting diperhatikan, yaitu sumber daya yang tersedia, insentif partisipasi, dan riwayat hubungan antara aktor. ditemukan bahwa sumber daya manusia (SDM) menjadi tantangan paling dominan di Kabupaten Asmat. Sebagian besar perangkat distrik dan kampung belum memiliki kemampuan teknis maupun konseptual dalam menyusun dokumen perencanaan. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas usulan pembangunan yang diajukan ke tingkat kabupaten, dan mengakibatkan penyusunan RPJMD cenderung disusun secara sentralistis oleh Bappeda.

Dari segi insentif, aktor non-pemerintah seperti masyarakat adat, perempuan, dan pemuda tidak memiliki dorongan kuat untuk berpartisipasi karena tidak melihat manfaat langsung dari keterlibatan mereka dalam Musrenbang atau FGD. Keterlibatan mereka lebih bersifat formalistik dan tidak menjanjikan perubahan nyata. Banyak tokoh masyarakat merasa bahwa aspirasi mereka tidak ditindaklanjuti dalam dokumen final RPJMD.

Riwayat kerja sama antar-aktor juga menunjukkan adanya ketegangan. Sebelumnya telah terjadi ketimpangan dalam proses komunikasi antara pemerintah dan masyarakat lokal. Misalnya, beberapa kebijakan yang menyentuh kepentingan adat tidak dibicarakan terlebih dahulu dengan tokoh adat. Kondisi ini memperkuat rendahnya kepercayaan dan memengaruhi keterbukaan masyarakat untuk terlibat dalam forum perencanaan. Secara keseluruhan, *starting condition* di Kabupaten Asmat menunjukkan bahwa kolaborasi dibangun dari posisi yang tidak seimbang, baik secara sumber daya, informasi, maupun relasi kekuasaan. Oleh karena itu, proses *Collaborative governance* memerlukan penguatan sejak tahap awal melalui peningkatan kapasitas dan strategi komunikasi lintas aktor.

3.2. *Institutional Design* (Desain Institusional)

Desain institusional (*institutional design*) mengatur bagaimana forum kolaboratif dibentuk dan dijalankan. Komponen ini mencakup partisipasi forum, aturan main, tingkat transparansi, dan keterbukaan forum terhadap berbagai kelompok masyarakat.

Musrenbang dan FGD merupakan dua forum utama yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Asmat. Namun, berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, proses tersebut masih didominasi aktor pemerintah, dengan sedikit keterlibatan dari sektor swasta, perempuan, dan masyarakat adat secara bermakna.

Secara aturan formal, dokumen teknokratik RPJMD telah mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Namun mekanisme transparansi dalam proses belum berjalan optimal. Dokumen hasil forum sering tidak dipublikasikan secara luas, dan masyarakat tidak mendapat

akses untuk mengevaluasi hasil akhir. Kurangnya umpan balik dari pemerintah membuat masyarakat enggan berpartisipasi dalam forum berikutnya.

Forum yang diselenggarakan juga sering bersifat terbatas, hanya mengundang kalangan tertentu seperti OPD, kepala kampung, dan elite lokal. Kelompok marginal seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan pemuda hampir tidak memiliki ruang suara. Hal ini bertentangan dengan prinsip inklusivitas dalam collaborative governance. Untuk memperkuat desain kelembagaan, Pemkab Asmat perlu memperluas cakupan forum publik, menyederhanakan akses terhadap dokumen perencanaan, dan mengembangkan aturan teknis partisipasi multisektor yang inklusif, agar setiap warga memiliki hak dan kesempatan setara dalam perencanaan pembangunan daerah.

3.3. *Facilitative Leadership (Kepemimpinan Fasilitatif)*

Kepemimpinan fasilitatif adalah tipe kepemimpinan yang mampu memediasi perbedaan kepentingan, menjembatani komunikasi antaraktor, dan mendorong konsensus dalam pengambilan keputusan. Dalam penyusunan RPJMD Asmat, peran kepala daerah dan Kepala Bappeda menjadi sentral. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa pemimpin lokal yang memahami konteks sosial dan budaya masyarakat Asmat seperti nilai adat, bahasa lokal, dan struktur social lebih mampu diterima dan dipercaya oleh masyarakat. Hal ini penting karena kolaborasi hanya bisa terbangun apabila pemimpin memiliki legitimasi di mata masyarakat.

Namun, masalah muncul pada aspek kompetensi interpersonal. Banyak pejabat teknis lebih berperan sebagai instruktur ketimbang fasilitator. Mereka mendominasi forum dan jarang memberikan ruang dialog dua arah. Akibatnya, diskusi menjadi sepihak dan tidak menggali potensi dari berbagai aktor yang hadir. Kepemimpinan yang efektif juga harus rasional dan strategis (Effendi, 2022). Seorang perencana daerah dituntut memahami kapasitas fiskal dan memfilter aspirasi yang realistis untuk masuk dalam RPJMD. Namun, dalam banyak kasus di Asmat, aspirasi masyarakat terlalu luas sementara dana terbatas, sehingga pemimpin harus mampu mengelola ekspektasi secara transparan dan bijak. Dengan demikian, kepemimpinan fasilitatif menjadi fondasi penting dalam keberhasilan tata kelola kolaboratif. Penguatan kapasitas komunikasi, mediasi konflik, dan pelatihan kepemimpinan berbasis nilai lokal perlu diperkuat untuk mendukung kolaborasi yang berkelanjutan.

3.4. *Collaborative Process (Proses Kolaborasi)*

Proses kolaborasi mencakup tahapan-tahapan inti seperti dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan (trust building), komitmen terhadap proses, pemahaman bersama (shared understanding), dan hasil sementara (intermediate outcomes). Proses penyusunan RPJMD Kabupaten Asmat telah mencerminkan adanya dialog melalui Musrenbang di berbagai tingkat. Namun, dialog ini belum inklusif karena tidak semua kelompok masyarakat dapat hadir dan menyampaikan gagasan mereka secara setara. Trust building menjadi tantangan utama. Sejarah hubungan yang timpang antara pemerintah dan masyarakat membuat masyarakat skeptis terhadap forum resmi. Kurangnya tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan memperkuat persepsi bahwa keterlibatan mereka tidak berarti. Oleh karena itu, kepercayaan perlu dibangun dengan menunjukkan hasil nyata dan membuka saluran komunikasi dua arah secara konsisten. Komitmen terhadap proses cukup tinggi dari sisi pemerintah, namun belum diimbangi dengan kontribusi aktif dari masyarakat. Hal ini karena tidak adanya mekanisme insentif, keterbatasan waktu, dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi RPJMD.

Dalam hal shared understanding, telah terjadi penyamaan persepsi pada isu-isu prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Akan tetapi, perbedaan pendapat masih muncul dalam hal prioritas penggunaan lahan dan pendekatan pembangunan kampung adat, yang menunjukkan pentingnya fasilitasi konflik berbasis nilai lokal. Intermediate outcomes tampak dalam perubahan pendekatan RPJMD yang mulai mencantumkan program berbasis

wilayah dan kearifan lokal, meskipun masih dalam tahap awal. Ke depan, keberhasilan proses ini bergantung pada konsistensi forum kolaborasi, penguatan dokumentasi hasil, dan evaluasi partisipatif yang melibatkan seluruh aktor.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *collaborative governance* dalam perumusan RPJMD Kabupaten Asmat 2025–2029 masih belum optimal. Proses kolaborasi lebih banyak berlangsung secara simbolis, partisipasi masyarakat tidak merata, dan aktor non-pemerintah belum memiliki posisi tawar yang kuat dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif di daerah tertinggal seperti Asmat masih menghadapi tantangan struktural dan kultural yang signifikan. Sama halnya dengan temuan penelitian Habibah et al. (2020) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musrenbang masih rendah dan bersifat formalitas. Penelitian tersebut menegaskan bahwa meskipun ada ruang partisipatif, masyarakat tidak benar-benar merasa memiliki suara dalam perencanaan. Ini memperkuat temuan penulis bahwa partisipasi masyarakat Asmat dalam penyusunan RPJMD hanya menjadi pelengkap administratif, tanpa daya pengaruh nyata terhadap substansi kebijakan. Berbeda dengan temuan Kusumawati et al. (2023) yang menyimpulkan bahwa komunikasi, kepercayaan, dan komitmen antara pemangku kepentingan dapat terjalin kuat dan mendorong keberhasilan kolaborasi, pada kasus Kabupaten Asmat justru ditemukan hambatan besar dalam membangun trust antaraktor. Riwayat relasi yang timpang dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menyebabkan resistensi dalam proses perencanaan. Ini menunjukkan bahwa efektivitas *collaborative governance* sangat bergantung pada konteks sosial-politik lokal yang spesifik. Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian Bila & Saputra (2019) yang menyebut bahwa keberhasilan tata kelola kolaboratif sangat dipengaruhi oleh adanya kesepahaman, komitmen bersama, dan proses dialog intensif antaraktor. Dalam penelitian ini, unsur face-to-face dialogue memang dilakukan, namun belum menghasilkan pemahaman bersama yang kokoh akibat ketimpangan kapasitas dan minimnya proses edukasi publik. Maka, kapasitas komunikasi dan pendidikan publik menjadi faktor kunci dalam memperkuat kolaborasi di daerah tertinggal. Temuan ini menolak sebagian dari penelitian Arrozaaq (2016) yang menyimpulkan bahwa kolaborasi lintas aktor telah berjalan efektif dalam pengembangan kawasan Minapolitan. Di Kabupaten Asmat, kolaborasi belum bisa disebut efektif karena belum adanya institutional design yang benar-benar membuka ruang bagi keterlibatan multipihak secara sistematis. Forum perencanaan masih eksklusif dan tidak inklusif terhadap kelompok-kelompok rentan. Penelitian ini juga memperkaya temuan Aeni & Astuti (2019) yang menegaskan bahwa sosialisasi dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penentu dalam keberhasilan kolaborasi lintas sektor. Penulis menemukan bahwa kegagalan sosialisasi terhadap dokumen RPJMD dan lemahnya literasi masyarakat mengenai pembangunan menyebabkan minimnya inisiatif partisipatif dari masyarakat itu sendiri. Ini menunjukkan pentingnya strategi komunikasi publik yang adaptif terhadap kondisi geografis dan budaya lokal.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi *collaborative governance* dalam perumusan RPJMD Kabupaten Asmat 2025–2029 belum berjalan optimal. Hal ini ditunjukkan oleh lemahnya kondisi awal kolaborasi, terbatasnya kapasitas sumber daya, dan partisipasi masyarakat yang masih simbolis. Desain kelembagaan yang ada belum mampu mendorong inklusi dan transparansi, serta forum kolaboratif masih bersifat prosedural. Kepemimpinan fasilitatif belum berperan sebagai jembatan antar aktor, dan proses kolaborasi belum menghasilkan kesepahaman bersama. Oleh karena itu, perencanaan berbasis kolaborasi di

Asmat perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas, regulasi yang inklusif, dan pendekatan komunikasi yang adaptif terhadap konteks lokal.

Keterbatasan Penelitian. Fokus hanya pada satu kabupaten (Kabupaten Asmat) sehingga belum dapat mewakili kondisi daerah 3T lainnya di Indonesia. Waktu penelitian terbatas, sehingga belum semua pihak dari sektor swasta dan masyarakat sipil dapat diwawancarai secara mendalam.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Peneliti menyarankan Penelitian lanjutan yang fokus pada tahap implementasi RPJMD, untuk melihat efektivitas dari desain kolaboratif yang sudah dirancang.

V. Ucapan Terimakasih

Pemerintah Kabupaten Asmat, khususnya Bappeda Kabupaten Asmat dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah memberikan informasi, data, dan dukungan selama pelaksanaan penelitian. Terimakasih juga saya ucapkan kepada Dosen Pembimbing, atas segala bimbingan, arahan, dan motivasi dalam menyelesaikan karya ilmiah ini dan seluruh pihak yang telah memberikan semangat, dukungan moral, maupun teknis, yang tidak dapat disebutkan satu per satu namun sangat berarti bagi keberhasilan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, Z., & Astuti, R. S. (2019). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kepariwisata Yang Berkelanjutan (Studi Pada Kegiatan Pesta Rakyat Simpedes Tahun 2019 Di Kabupaten Pati). *Conference on Public Administration and Society*, 1(01).
<http://proceedings.undip.ac.id/index.php/copas/article/download/22/7>
- Arrozaq, D. L. C. (2016). *Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo)*. Universitas Airlangga. <https://repository.unair.ac.id/67685/3/Sec.pdf>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of public administration research and theory*, 18(4), 543-571.
<https://www.academia.edu/download/102709319/mum032.pdf>
- Bila, A., & Saputra, B. (2019). Strategi Collaborative Governance dalam Pemerintahan. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 9(2), 196–210.
<https://jta.lan.go.id/index.php/jta/article/download/114/60>
- Borges, A. M., Dourado, A. B. de F., de Andrade, M. O., & de Aragão, J. J. G. (2025). Regional development and transport infrastructure in the Brazilian amazon region: a literature review on governmental plans for the Transamazon Highway. *Transportation Research Procedia*, 82, 2262–2275. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.trpro.2024.12.185>
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran* ((Edisi Keempat)). Pustaka Belajar.
- Effendi, L. M. (2022). Upaya perubahan struktur organisasi pemerintah daerah Kabupaten Bandung dalam menciptakan kualitas pelayanan publik. *Jurnal Media Birokrasi*, 51–66.
<https://ejournal.ipdn.ac.id/JMB/article/download/2745/1357>

- Firmansyah, F., Budiman, A., Adilansyah, A., Muhamadong, M., & Nur, M. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(1), 668–674.
<https://ejournal.ung.ac.id/index.php/ONM/article/download/15599/4835>
- Gupta, A. K., & Sigdel, T. S. (2024). Integrating Sustainable Development Goals in local plans: Unlocking practices and challenges of local governments in Nepal. *Heliyon*, 10(20), e39615. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e39615>
- Habibah, E. N., Zuthfiah, R., Fitriyati, F., Rachmad, F., & Listianingrum, A. (2020). Collaborative Governance Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Rt/Rw (Studi Kasus Di Rw 2 Kelurahan Tidar Selatan Kota Magelang). *JMAN Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara*, 4(1), 1–14.
<https://jom.untidar.ac.id/index.php/jman/article/view/881/475>
- Ika Sartika. (2024). Collaborative Governance Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. *JAPD IPDN*, 84.
<https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/4864>
- Kusworo, Hadi Prabowo, Obsatar Sinaga, & Margaretha Rumbekwan. (2021). Participatory Planning in Collaborative Governance Perspective in Banyumas Regency, Central Java Province, Indonesia. In *Repository Institut Pemerintahan Dalam Negeri* (Vol. 88).
<http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/779>
- Nururrohmah, Z., & Suhirman. (2016). Shared-power Governance in Managing Common Pool Resources Case Study: Collaborative Planning to Manage Thematic Parks in Bandung City, Indonesia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 227, 465–476.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.06.102>
- Putra, M. A. R. (2018). *Peningkatan Kepercayaan Publik Melalui Pemerintahan Partisipatif (Studi Pada Pelaksanaan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Manajemen Inovasi Pembangunan Berbasis Partisipasi Publik)* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
https://repository.unair.ac.id/74687/3/JURNAL_Fis.AN.85%2018%20Put%20p.pdf
- Sumaryana, A., Miftah, A. Z., Widianingsih, I., & Karlina, N. (2025). Turning over a new leaf: Post-Covid infrastructure development planning and financing strategies in the organizational environment of Bandung City. *Regional Science Policy & Practice*, 17(3), 100170. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rspp.2024.100170>
- Sumarno, D. A. (2025). *Collaborative Governance Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 Di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
http://eprints.ipdn.ac.id/23428/1/Repository_Anisa%20Nur%20Muhajanah%20revisi%20FINAL.pdf